

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-11/PJ/2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2021 TENTANG TATA CARA
PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI YANG
TERUTANG ATAS DOKUMEN BERUPA CEK DAN BILYET
GIRO

A. PERMOHONAN IZIN PEMBUBUHAN SENDIRI CAP BUKTI PELUNASAN
SELISIH KURANG BEA METERAI
1. CONTOH FORMAT PERMOHONAN IZIN

.....(1)	
Nomor :	(2)
Lampiran : 1 (satu) set	(3)
Hal : Permohonan izin pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai	
Yth. Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Kantor Pelayanan Pajak	(4)
<p>Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai yang Terutang atas Dokumen Berupa Cek dan Bilyet Giro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2021, dengan ini kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : (5) NPWP : (6) Jabatan : (7) bertindak sebagai Wakil/Pengurus/Pejabat* dari: Nama : (8) NPWP : (9)</p> <p>memohon izin pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai yang terutang atas dokumen berupa cek dan/atau bilyet giro*) dengan jumlah sebanyak (10) lembar dan nomor seri sampai dengan (11) sebagaimana tercantum dalam keterangan pada SSP yang telah mendapatkan NTPN. Terlampir disampaikan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Daftar cek dan/atau bilyet giro yang akan dilakukan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.2. Daftar identitas pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.3. SSP yang telah mendapatkan NTPN. <p>Demikian permohonan ini disampaikan.</p> <p style="text-align: right;">Hormat kami,</p> <p style="text-align: right;">..... (12)</p>	
* coret yang tidak perlu	

PETUNJUK PENGISIAN
PERMOHONAN IZIN PEMBUBUHAN SENDIRI
CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat (kop).
- Angka 2 : diisi dengan nomor surat.
- Angka 3 : diisi dengan nama kota dan tanggal surat dibuat.
- Angka 4 : diisi dengan tujuan surat yaitu Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala KPP dan alamat KPP tempat Wajib Pajak diadministrasikan.
- Angka 5 : diisi dengan nama wakil, pengurus, atau pejabat.
- Angka 6 : diisi dengan NPWP wakil, pengurus, atau pejabat.
- Angka 7 : diisi dengan jabatan wakil, pengurus, atau pejabat.
- Angka 8 : diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Angka 9 : diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Angka 10 : diisi dengan jumlah lembar cek dan/atau bilyet giro yang akan dibubuhi cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
- Angka 11 : diisi dengan nomor seri cek dan/atau bilyet giro yang akan dibubuhi cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
- Angka 12 : diisi dengan tanda tangan dan nama wakil, pengurus, atau pejabat.

2. CONTOH FORMAT LAMPIRAN 1 PERMOHONAN IZIN

DAFTAR CEK DAN/ATAU BILYET GIRO
YANG AKAN DILAKUKAN PEMBUBUHAN SENDIRI
CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI

NO.	JENIS WARKAT	NOMOR SERI AWAL	NOMOR SERI AKHIR	JUMLAH WARKAT (LEMBAR)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst.				
TOTAL			

Hormat kami,

..... (6)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR CEK DAN/ATAU BILYET GIRO
YANG AKAN DILAKUKAN PEMBUBUHAN SENDIRI
CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI

- Angka 1 : diisi dengan nomor urut.
- Angka 2 : diisi dengan jenis warkat berupa cek atau bilyet giro.
- Angka 3 : diisi dengan nomor seri awal warkat berupa cek atau bilyet giro (jika nomor seri berurut).
- Angka 4 : diisi dengan nomor seri akhir warkat berupa cek atau bilyet giro (jika nomor seri berurut).
- Angka 5 : diisi dengan jumlah lembar warkat berupa cek atau bilyet giro.
- Angka 6 : diisi dengan tanda tangan dan nama wakil, pengurus, atau pejabat.

3. CONTOH FORMAT LAMPIRAN 2 PERMOHONAN IZIN

DAFTAR IDENTITAS PEJABAT YANG DITUNJUK
UNTUK MELAKSANAKAN PEMBUBUHAN SENDIRI
CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI

NO.	NAMA PEJABAT	NOMOR KTP	NPWP	JABATAN	SPESIMEN TANDA TANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

Hormat kami,

..... (7)

PETUNJUK PENGISIAN
DAFTAR IDENTITAS PEJABAT YANG DITUNJUK
UNTUK MELAKSANAKAN PEMBUBUHAN SENDIRI
CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI

- Angka 1 : diisi dengan nomor urut.
- Angka 2 : diisi dengan nama pejabat yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
- Angka 3 : diisi dengan nomor Kartu Tanda Penduduk pejabat yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
- Angka 4 : diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak pejabat yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
- Angka 5 : diisi dengan jabatan pejabat yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
- Angka 6 : diisi dengan spesimen tanda tangan pejabat yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
- Angka 7 : diisi dengan tanda tangan dan nama wakil, pengurus, atau pejabat.

B. CONTOH FORMAT SURAT IZIN PEMBUBUHAN CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

.....(1)

SURAT IZIN PEMBUBUHAN CAP BUKTI PELUNASAN
SELISIH KURANG BEA METERAI

Nomor: SI-...../SKBM/WPJ...../KP...../..... (2)

Tanggal: (3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang : Surat (4) nomor tanggal (5)
perihal (6);

Mengingat : 1. Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 tentang Bea Meterai;
2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
01/PJ/2021 tentang Tata Cara Pelunasan Selisih
Kurang Bea Meterai yang Terutang atas Dokumen
Berupa Cek dan Bilyet Giro sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-11/PJ/2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan izin pembubuhan cap bukti pelunasan selisih
kurang Bea Meterai yang terutang atas dokumen berupa
cek dan/atau bilyet giro*) kepada:

Nama : (7)

NPWP : (8)

Alamat : (9)

Pembubuhan dilakukan pada cek dan/atau bilyet giro*)
dengan jumlah sebanyak (10) lembar dan nomor
seri sampai dengan (11).

a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak,

..... (12)

*) coret yang tidak perlu.

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT IZIN PEMBUBUHAN
CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA METERAI

- Angka 1 : diisi dengan kepala surat (kop).
- Angka 2 : diisi dengan nomor Surat Izin Pembubuhan Cap Bukti Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai.
- Angka 3 : diisi dengan tanggal Surat Izin Pembubuhan Cap Bukti Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai.
- Angka 4 : diisi dengan nama Wajib Pajak (bank) pemohon Surat Izin Pembubuhan Cap Bukti Pelunasan Selisih Kurang Bea Meterai.
- Angka 5 : diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
- Angka 6 : diisi dengan perihal surat permohonan pembubuhan sendiri cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
- Angka 7 : diisi dengan nama Wajib Pajak (bank).
- Angka 8 : diisi dengan nama Nomor Pokok Wajib Pajak (bank).
- Angka 9 : diisi dengan alamat Wajib Pajak (bank).
- Angka 10 : diisi dengan jumlah lembar cek dan/atau bilyet giro yang diberi izin untuk dibubuhi cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
- Angka 11 : diisi dengan nomor seri cek dan/atau bilyet giro yang diberi izin untuk dibubuhi cap bukti pelunasan selisih kurang Bea Meterai.
- Angka 12 : diisi dengan nama dan tanda tangan Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Pajak serta dibubuhi cap KPP.

C. CONTOH FORMAT BENTUK CAP BUKTI PELUNASAN SELISIH KURANG BEA
METERAI



Ukuran : - lebar maksimal 1 cm
- panjang maksimal 3 cm

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.

KEPALA BAGIAN UMUM,



DWI BUDI ISWAHYU

NIP 19701102 199012 1 001